SUGENG SUHARTO

KEBIJAKAN PROGRAM SUBSIDI BBM

KEBIJAKAN PROGRAM SUBSIDI BBM

SUGENG SUHARTÖ

Penerbit widina

KEBIJAKAN PROGRAM SUBSIDI BBM

Penulis:
Sugeng Suharto

Desain Cover:
Fawwaz Abyan

Tata Letak:
Atep Jejen

Editor:
N. Rismawati

ISBN:
978-623-459-364-8

Cetakan Pertama:
Maret, 2023

Hak Cipta 2023, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2023
by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung
All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG
(Grup CV. Widina Media Utama)
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina
Telpon (022) 87355370

PRAKATA

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul "Kebijakan Program Subsidi BBM" telah selesai disusun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang kebijakan program subsidi BBM.

Kebijakan pengalihan subsidi harga BBM dalam bentuk subsidi langsung dalam bentuk program kompensasi sudah dimulai sejak tahun 2000. Kebijakan tersebut pada tahun 2000 lebih dikenal dengan Dana Kompensasi Sosial (DKS) dengan alokasi dana sebesar Rp. 807 milyar. Alokasi tersebut untuk membiayai program raskin, pelayanan kesehatan dan infrastruktur perdesaan. Subsidi pemerintah terhadap harga BBM selama ini dipandang salah sasaran. Hal ini disebabkan karena sebagian besar subsidi tersebut justru dinikmati oleh masyarakat menengah ke atas. Oleh karena itu perlu ada suatu mekanisme yang memungkinkan penduduk miskin memperoleh keuntungan yang lebih besar dari subsidi pemerintah.

Salah satu cara yang dipandang strategis adalah dengan mengalihkan subsidi harga BBM menjadi subsidi langsung kepada penduduk miskin dalam bentuk kompensasi. PKPS BBM merupakan salah satu bentuk pengalihan subsidi harga BBM menjadi subsidi langsung kepada penduduk/keluarga miskin. Ekses dari pengalihan subsidi tersebut adalah meningkatnya harga BBM yang secara otomatis akan memberatkan beban hidup penduduk miskin.

Sehingga selama ini pemerintah telah melakukan berbagai usaha untuk menjamin agar subsidi langsung dalam bentuk PKPS-BBM berjalan sesuai dengan tujuan pengalihan subsidi harga BBM. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melibatkan berbagai pihak untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan untuk mengetahui lebih lanjut serta mendalam maka kita haus bersama buku ini membaca dan memahaminya.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan "*tiada gading yang tidak retak*" dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik Tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca

sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Maret, 2023

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **v**
BAB 1 PROBLEMATIKA SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK **1**
BAB 2 KONDISI GEOGRAFIS DAERAH PENYALURAN SUBSIDI **5**
A. Kondisi Geografis dan Kependudukan 5
B. Kondisi Kesejahteraan Sosial 7
BAB 3 PELAKSANAAN PROGRAM KOMPENSASI BBM **23**
A. Bidang Pendidikan 23
B. Bidang Kesehatan (JPKMM) 33
C. Prosedur Pelayanan Kesehatan 45
D. Program Subsidi Tunai Langsung (SLT) 67
BAB 4 PROSES VERIFIKASI DATA PENERIMA SUBSIDI **89**
A. Tujuan, Luaran, Kegiatan, Cakupan Wilayah dan Waktu 89
B. Evaluasi Tingkat Pencapaian BKPS 104
BAB 5 MEKANISME IDENTIFIKASI KELUARGA MISKIN **123**
A. Kondisi Desa Penerima PKPS BBM 123
B. Desa Pasar Baru, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur 126
C. Penerapan Program Pembangunan Desa 129
D. Desa Tanjung Baru, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur 132
E. Desa Banyumas, Kabupaten Rejang Lebong 136
F. Desa Air Meles, Kabupaten Rejang Lebong 138
G. Desa Taktoi, Kabupaten Rejang Lebong 140
H. Desa Jabi, Kabupaten Rejang Lebong 142
BAB 6 EVALUASI PROGRAM KOMPENSASI DAN PENGURANGAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK (PKPS BBM) **145**
A. Pengantar 145
B. Pelaksanaan PKPS BBM yang Dipantau 146
C. Wilayah Objek Sasaran Program 147
D. Tahap Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi 148
E. Permasalahan Pelaksanaan PKPS BBM dan Solusinya 149
F. Hasil Pemantauan dan Evaluasi 154
BAB 7 PEMANTAUAN DAN EVALUASI PKPS **163**
A. Analisis BOS atau BKM 163
B. Tabulasi dan Analisis Data Kuantitatif JPKMM (Kesehatan) 167
C. Analisis Infrastruktur Pedesaan (IP) 170

BAB 8 PENUTUP **175**
A. Kesimpulan 175
B. Rekomendasi 181
DAFTAR PUSTAKA **185**
PROFIL PENULIS **187**

BAB

1

PROBLEMATIKA SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK

Subsidi pemerintah terhadap harga BBM selama ini dipandang salah sasaran. Hal ini disebabkan karena sebagian besar subsidi tersebut justru dinikmati oleh masyarakat menengah ke atas. Oleh karena itu perlu ada suatu mekanisme yang memungkinkan penduduk miskin memperoleh keuntungan yang lebih besar dari subsidi pemerintah. Salah satu cara yang dipandang strategis adalah dengan mengalihkan subsidi harga BBM menjadi subsidi langsung kepada penduduk miskin dalam bentuk kompensasi. PKPS BBM merupakan salah satu bentuk pengalihan subsidi harga BBM menjadi subsidi langsung kepada penduduk/keluarga miskin. Ekses dari pengalihan subsidi tersebut adalah meningkatnya harga BBM yang secara otomatis akan memberatkan beban hidup penduduk miskin.

Kebijakan pengalihan subsidi harga BBM dalam bentuk subsidi langsung dalam bentuk program kompensasi sudah dimulai sejak tahun 2000. Kebijakan tersebut pada tahun 2000 lebih dikenal dengan Dana Kompensasi Sosial (DKS) dengan alokasi dana sebesar Rp. 807 milyar. Alokasi tersebut untuk membiayai program raskin, pelayanan kesehatan dan infrastruktur perdesaan. Pada tahun 2001 program yang sama dikenal dengan nama Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi (PPD-PSE). Untuk program ini telah dialokasikan dana jauh lebih besar dari tahun 2000, yaitu sebesar Rp. 2,2 triliyun. Cakupan program ini lebih luas dari sebelumnya, yaitu raskin, pelayanan kesehatan, prasarana air bersih, pendidikan, transportasi, permakanan, dan dana bergulir.

BAB

2

KONDISI GEOGRAFIS DAERAH PENYALURAN SUBSIDI

A. KONDISI GEOGRAFIS DAN KEPENDUDUKAN

Secara geografis Provinsi Bengkulu terletak antara 101 derajat 01' dan 103 derajat 46' Bujur Timur serta 2 derajat 16' dan 5 derajat 31' Lintang Selatan. Keadaan alamnya terdiri dari dataran tinggi di bagian timur memanjang kearah utara menyusur Bukit Barisan, sedangkan dibagian barat memanjang kearah selatan merupakan dataran rendah dan menyusuri pantai Samudra Hindia. Provinsi Bengkulu memiliki garis pantai sepanjang 524 km. Sebagian besar dataran tinggi yang ada di Provinsi Bengkulu merupakan hutan lindung. Provinsi Bengkulu termasuk daerah yang rawan bencana gempa bumi.

Sebelah utara Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat, sebelah timur dengan Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan, sedangkan sebelah selatan dengan Provinsi Lampung. Sementara sebelah barat langsung berbatasan dengan Samudra Hindia. Suhu udara di Provinsi Bengkulu rata-rata 25,60 derajat *Celcius*, dengan suhu minimum 22,50 derajat *Celcius* dan maksimum 32,50 derajat *Celcius*. Arah angin Umumnya dari arah barat dan selatan dengan kecepatan rata-rata 58 km/jam. Sampai tahun 2003, Provinsi Bengkulu terdiri atas 1 kota dan 3 kabupaten, yaitu kota madya Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Rejang Lebong. Seiring pengembangan reformasi disegala bidang, maka tahun 2003 Provinsi Bengkulu Mengalami pemekaran menjadi 7 daerah tingkat dua, yakni Kota Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur dan Seluma (pemekaran Kab. Bengkulu Selatan), Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kabupaten Muko-muko (pemekaran Kab. Bengkulu

BAB

3

PELAKSANAAN PROGRAM KOMPENSASI BBM

A. BIDANG PENDIDIKAN

1. Bantuan Operasi Sekolah (BOS)

Bantuan operasional sekolah (BOS) merupakan salah satu bentuk Program Kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak (PKPS BBM) pada bidang pendidikan. Program BOS bertujuan untuk memberikan bantuan kepada sekolah dalam rangka membebaskan iuran siswa, tetapi sekolah tetap dapat mempertahankan mutu pelayanan pendidikan kepada masyarakat.

Dengan melalui program BOS maka pemenuhan hak setiap warga negara untuk mendapatkan layanan pendidikan serta mengurangi disparitas partisipasi sekolah antar kelompok masyarakat dapat teratasi. Sehingga program BOS secara langsung juga merupakan upaya implementasi pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang sekaligus merupakan upaya pemerintah dalam menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Ini berarti program BOS merupakan upaya penanggulangan hak didik keluarga miskin yang pada umumnya tingkat partisipasi pendidikannya rendah sebagai akibat tingginya biaya pendidikan, baik biaya langsung maupun tidak langsung.

a. Kondisi Umum Program

Kegiatan program BOS diantaranya adalah untuk memberikan bantuan kepada sekolah dalam rangka membebaskan iuran siswa, tetapi sekolah tetap dapat mempertahankan mutu pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Sehingga dalam pelaksanaan program BOS didasarkan pada beberapa

BAB

4

PROSES VERIFIKASI DATA PENERIMA SUBSIDI

A. TUJUAN, LUARAN, KEGIATAN, CAKUPAN WILAYAH DAN WAKTU

1. Tujuan

Untuk memperoleh data dan informasi mengenai kemiskinan di kabupaten Rejang Lebong dan kabupaten Kaur provinsi Bengkulu sebagai wilayah sampel pemantauan dan evaluasi PKPS BBM tahun 2005, khususnya 8 desa/kelurahan yang ada sebagai bahan verifikasi data penduduk/keluarga miskin.

2. Luaran

a. Kriteria penduduk/keluarga miskin
b. Data peringkat penduduk/keluarga miskin yang akan dijadikan acuhan proses pemantauan dan evaluasi PKPS BBM tahun 2005
c. Perbandingan jumlah penduduk miskin berdasarkan informasi masyarakat dengan jumlah penduduk/keluarga miskin yang digunakan dalam program.

3. Kegiatan

a. Fasilitas proses identifikasi sasaran program melalui musyawarah desa/keluarga.
b. Pengumpulan informasi tentang perkembangan dan permasalahan pelaksanaan program

BAB

5

MEKANISME IDENTIFIKASI KELUARGA MISKIN

A. KONDISI DESA PENERIMA PKPS BBM

Untuk memperoleh data dan informasi mengenai kemiskinan di tingkat kelurahan/desa sebagai penentu penerimaan manfaat program PKPS BBM dilakukan dengan melakukan verifikasi data melalui musyawarah. Mekanisme dalam mengidentifikasi keluarga miskin dilakukan dengan memfasilitasi kegiatan musyawarah perangkat desa dengan agenda utama: (1) penentuan kriteria penduduk/keluarga miskin menurut versi masyarakat setempat;

(2) membuat dan meranking gakin berdasarkan rumusan kemiskinan hasil kesepakatan perangkat desa; (3) menjaring tentang proses bantuan infrastruktur, serta (4) menjaring berbagai tanggapan dan usulan sehubungan dengan proses pelaksanaan PKPS BBM. Verifikasi identifikasi keluarga miskin dilakukan pada 8 (delapan) desa miskin yang dijadikan sebagai lokasi saran Registan PKPS BBM. Pelaksanaan kegiatan FGD di desa pasar lama dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober tahun 2005, dimulai pada jam 16’00 WIB dan selesai pada jam 17'50 WIB. Kegiatan FGD dilaksanakan di rumah kepala desa, dihadiri oleh kepala desa, ketua pokmas, tokoh masyarakat, tokoh agama dan perangkat data lainnya.

Kegiatan FGD diawali dengan penjelasan tentang maksud dan tujuan pertemuan oleh ketua tim. Inti dari penjelasan ketua Tim diantaranya adalah (a) tentang bentuk bantuan kompensasi BBM pada gakin yang meliputi subsidi tunai langsung; bantuan pembangunan infrastruktur; program BOS dan BKM bagi anak gakin yang sekolah serta kartu sehat bagi gakin, (b) menjaring permasalahan yang terjadi di masyarakat sehubungan dengan

BAB

6

EVALUASI PROGRAM KOMPENSASI DAN PENGURANGAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK (PKPS BBM)

A. PENGANTAR

Subsidi pemerintah terhadap harga BBM selama ini dipandang salah sasaran, sebab sebagian besar subsidi tersebut justru dinikmati oleh masyarakat menengah keatas. Oleh karena itu perlu ada suatu mekanisme yang memungkinkan penduduk/keluarga miskin memperoleh keuntungan yang lebih besar dari subsidi pemerintah. Salah satu cara yang dipandang strategis adalah dengan mengalihkan subsidi harga BBM menjadi subsidi langsung kepada penduduk miskin dalam bentuk kompensasi. PKPS BBM merupakan salah satu bentuk pengalihan subsidi harga BBM menjadi subsidi langsung kepada penduduk/keluarga miskin. Ekses dari pengalihan subsidi tersebut adalah meningkatnya harga BBM yang secara otomatis akan memberatkan beban hidup penduduk miskin.

Pada tahun 2005, harga BBM mengalami 2 kali kenaikan yaitu 1 Maret dan 1 Oktober sebagai akibat dari kenaikan harga BBM di pasar dunia. Kenaikan harga BBM mengakibatkan menambah beban subsidi BBM hingga dapat mencapai RP. 113,7 triliun. Untuk lebih meningkatkan ketepatan sasaran subsidi, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pemerintah mengalokasikan dana tersebut dalam bentuk PKPS BBM sebesar 18,339 trilyun. Dibanding tahun 2003 yang lalu peruntukan dana PKPS-BBM 2005 mengalami perubahan yang cukup signifikan. Jika pada tahun 2003 terdapat 11 program yang tercakup dalam program kompensasi, pada tahun 2005 terfokus pada empat program, yaitu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), di sektor pendidikan dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan

BAB

7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PKPS

A. ANALISIS BOS ATAU BKM

Tabel 7.1 Frekuensi BOS SD/MI

No. Pertanyaan	Jumlah Responden	Frekuensi Jawaban				Prosentase (%)			
		a	b	c	d	A	b	c	D
119	517	395	122	0	0	76.40	23.60	0.00	0.00
120	517	12	415	90	0	2.32	80.27	17.41	0.00
121	517	210	113	194	0	40.62	21.86	37.52	0.00
122	517	391	126	0	0	75.63	24.37	0.00	0.00
123	517	401	116	0	0	77.56	22.44	0.00	0.00
124	517	213	304	0	0	41.20	58.80	0.00	0.00
125	517	233	278	0	0	45.07	53.77	1.16	0.00
125a	517	Rp	77.500,-						
125b	517	Rp	57.500,-						
125c	517	416	100.6		0 0	80.00	20.00	0.00	0.00

Table 7.2 BOS SMP/MTs

No. Pertanyaan	Jumlah Responden	Frekuensi jawaban				Prosentase (%)			
		a	b	c	d	a	b	c	d
119	87	57	30	0	0	65.52	34.48	0.00	0.00
120	87	15	72	0	0	17.24	82.76	0.00	0.00
121	87	56	31	0	0	64.37	35.63	0.00	0.00
122	87	79	8	0	0	90.80	9.20	0.00	0.00
123	87	77	10	0	0	88.51	11.49	0.00	0.00
124	87	46	41	0	0	52.87	47.13	0.00	0.00

BAB 8

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dan pembahasan dalam buku ini, setidaknya terdapat beberapa poin penting sekaligus menjadi perhatian utama, diantaranya:

1. Hasil Pemantauan PKPS Tahun 2005

a. Umum

1) Semua program yang dipantau, yaitu Bidang Pendidikan (BOS dan BKM), Bidang Kesehatan (J PKMM), Bidang Infrastruktur Pedesaan (IP), dan Subsidi Langsung Tunai (SLT) pada umumnya telah dilaksanakan. Permasalahan terbesar yang dihadapi adalah terlambatnya waktu pencairan dana. Keterlambatan ini berdampak cukup luas terhadap kualitas keberhasilan program.
2) Data penerima KKB yang dikeluarkan BPS ternyata berbeda cukup berarti dengan data penerima kartu Askeskin yang dikeluarkan Dinas Kesehatan. Permasalahan ini mengakibatkan tidak semua penduduk/keluarga miskin mendapatkan pelayanan kedua program tersebut yang pada akhirnya berdampak pada tetap beratnya tanggungan yang harus dipikul oleh penduduk/keluarga miskin.
3) Data penduduk/keluarga miskin penerima program (KKB) setelah diverifikasi, ternyata perbandingannya dengan data penduduk/keluarga miskin menurut masyarakat setempat 1 : 2,43. Kondisi ini menunjukkan bahwa data penerima program PKPS BBM tahun 2005 tidak dapat dikatakan sebagai data penduduk/keluarga miskin sesungguhnya yang ada di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Addink, H. (2019). Good Governance: Concept and Context. In Oxford University Press (1st ed.). Oxford University Press.

Adisasmita, Raharja.2005. Dasar daar Ekonomi Wilayah, Jogjakarta, Penerbit graha Ilmu.

Andi M. Iqbal , Roy V. Salomo. (2022).Analisis Kebijakan Pengenalan Pajak Atas Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Minyak Solar. Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Badan Pusat Statistik, 2005, Petunjuk Pendistribusian Kartu Kompensasi Bahan Bakar Minyak 2005, Jakarta.

…… 2005. Pelaksanaan Pendataan Rumah Tangga Miskin Kementerian Koordinato Bidang Kesejahteraan Rakyat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi, tahun 2005 oleh Perguruan Tiggi, Jakarta.

Daiyuddin, M., Hendrik, & Yulinda, E. (2016). "Dampak Kenaikan Harga BBM (Solar) Terhadap Kegiatan Penangkapan Nelayan yang Mendaratkan Hasil Tangkapan di PPS Bungus Sumatera Barat (Kasus: Nelayan Bagan Apung 21 GT dan 30 GT)". Jurnal Online Mahasiswa, Vol. 3

De Vrice, 2004 Public Policy, Bavaerly Hills Press, United State of America.

Diamond, Larry. 1999. Developing democracy toward consolidation, Institute for Research and Empowerment (IRE), Jogjakarta.

Dunn, William, N, 2010. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Gadjah Mada University, Jogjakarta.

Kunarjo. 2002. Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta

Mubyarto. 2000. Membangun Sistem Ekonomi, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta.

Saptanto, S., & Wijaya, R. A. (2014). "Prakiraan Dampak Pengurangan Subsidi BBM Pada Usaha Perikanan". Jurnal kebijakan Sosek KP, Vol. 4, No. 2, h.129-136.

Saptanto, S., Zamroni, A., Ramadhan, A., & Wijaya, R. A. (2016). "Analisis Kebijakan Dampak Penyesuaian Harga BBM Bersubsidi Untuk Nelayan". Kebijakan Sosek KP, Vol. 6, h. 85-95.

Suharto, Sugeng.2021. Separuh Jalan Pembangunan. Evaluasi Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kepahiang, Penerbit PT Nas Media Indonesia. Makasar.

Suharto. Edi. 2007. Kebijakan Sosial Penerbit ALFABETA, Bandung.

Suryadi..2019. “Dampak Kenaikan Harga Bbm Dan Elastisitas Konsumsi Bbm Sektor Angkutan: Studi Perbandingan Pada Beberapa Sektor Ekonomi.” Warta Penelitian Perhubungan 27 (2): 95.https://doi.org/10.25104/warlit.v27i2.776.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1998. Pengantar Administrasi Pembangunan, LP3Es, Jakarta.

PROFIL PENULIS

Sugeng Suharto, lahir 19 Agustus 1966 di Tegal, adalah dosen tetap Universitas Bengkulu, Sumatra, dengan tugas tambahan sebagai Koordinator Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik (s2) untuk periode kedua kalinya sejak 2018, dan sekarang 2022-2026. Pengalaman manajemen Perguruan Tinggi diperolehnya Ketika menjabat Rektor pada tahun 2014 sd 2019, Dekan pada periode 2006-2010 dan 2010-2014. Sedangkan pengalaman pengabdian sebagai Detaser Dikti sejak tahun 2013. Di bidang Pengembangan Ilmu, pernah mendapat kepercayaan di DPD RI Senayan Jakarta sebagai *Staff* Ahli DPD RI pada tahun 2011-2013. Pendidikan yang ditempuh S1 dari Universitas Sebelas Maret, S2 Universitas Gadjah Mada, dan S3 Universitas Airlangga. Disamping *short course* di Australia, Malaysia, dan Thailand.

Kapabilitasnya di bidang Kebijakan Publik teruji sebagai tenaga ahli dan konsultansi di instansi pemerintah, pemerintah daerah propinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Terlebih semenjak mendapatkan kepercayaan lulus pada Pendidikan Program Singkat Angkatan (PPSA) XXI Lemhannas RI pada tahun 2017, menguatkan dirinya menjadi narasumber nasional terkait bidang Kebijakan dan Pelayanan Publik.

Penelitian yang sedang dilakukan saat ini terkait dengan Evaluasi Kebijakan, Perencanaan Pembangunan, dan Kerja sama atau Kemitraan Organisasi Pemerintah dengan Pihak Swasta (*Public Private Partnership*), baik Organisasi Sosial maupun Korporat. Kapasitasnya pada penelitian Kebijakan Program Subsidi Bahan Bakar Minyak, sebagai Tim Pemantau Nasional Kebijakan Program Subsidi Bahan Bakar Minyak.

KEBIJAKAN PROGRAM SUBSIDI

BBM

Kebijakan pengalihan subsidi harga BBM dalam bentuk subsidi langsung program kompensasi sudah dimulai sejak tahun 2000. Kebijakan tersebut pada tahun 2000 lebih dikenal dengan Dana Kompensasi Sosial (DKS) dengan alokasi dana sebesar Rp. 807 milyar. Alokasi tersebut untuk membiayai program raskin, pelayanan kesehatan dan infrastruktur perdesaan. Subsidi pemerintah terhadap harga BBM selama ini dipandang salah sasaran. Hal ini disebabkan karena sebagian besar subsidi tersebut justru dinikmati oleh masyarakat menengah ke atas. Oleh karena itu perlu ada suatu mekanisme yang memungkinkan penduduk miskin memperoleh keuntungan yang lebih besar dari subsidi pemerintah. Salah satu cara yang dipandang strategis adalah dengan mengalihkan subsidi harga BBM menjadi subsidi langsung kepada penduduk miskin dalam bentuk kompensasi.

PKPS BBM merupakan salah satu bentuk pengalihan subsidi harga BBM menjadi subsidi langsung kepada penduduk/keluarga miskin. Ekses dari pengalihan subsidi tersebut adalah meningkatnya harga BBM yang secara otomatis akan memberatkan beban hidup penduduk miskin. Selama ini, pemerintah telah melakukan berbagai usaha untuk menjamin agar subsidi langsung dalam bentuk PKPS-BBM berjalan sesuai dengan tujuan pengalihan subsidi harga BBM. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melibatkan berbagai pihak untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan untuk mengetahui lebih lanjut serta mendalam maka kita haus bersama buku ini membaca dan memahaminya.

Penerbit widina
www.penerbitwidina.com

ISBN 978-623-459-364-8
9 786234 593648